

PENGARUH KEBIJAKAN PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN TERHADAP TINGKAT KESEJAHTRAAN MASYARAKAT

(Suatu Studi Di Kecamatan Bunaken Kota Manado)

**IRENE ARUNDE
JANTJE MANDEY
SALMIN. DENGGO**

Abstract: The foreign to enlarge a district as a movement to increase the ability of the district government to make a short control of the government and to increase the human prosperity. As a matter of fact there are still found the people in the districk has unprosperity. Based on the fact, so this research has to intend to answer the question, “whether the enlarge of districk effective to the level of human prosperity”.

The research used the quantitative method. This research is made based on five example areas in the district Bunaken of Manado city, The research sampel is stated for one-hundred respondens which is taken twenty sampel of the respondens for dach area in the district randomly, to collect the data the questioner methad is used and helping by the interview technique. The data analysis used statistic analysis regression linear and correlation product moment.

Based the data analysis show that : The effectiveness coefficient regression of the foreign to enlarge a district area concerning human prosperity is 0.779 scale for each unit, and Coefficient collation effect in the foreign to enlarge a district area concerning human prosperity is 0,83, and the determination coefficient is 0,69 or 69%. Based of the research, the conclusion is the foreign to enlarge the district area has a positive effect and significant to improve the human prosperity. Based of the coclusion above, suggesting for responsive of the government to running this program to create the human prosperity.

Keywords : The foreign to enlarge a district, prosperity.

PENDAHULUAN

Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Sedangkan Daerah Otonom atau disebut juga dengan daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri

berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada hakekatnya diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan. Sesuai hal tersebut, daerah diberikan kewenangan yang luas untuk menjalankan dan melaksanakan urusan-urusan

pemerintahan, disertai pula dengan pemberian hak untuk menggali berbagai sumber potensi daerah guna menunjang pembangunan di daerah.

Seperti Kecamatan Manado Utara, Ketika pemerintah kolonial Belanda berkuasa, wilayah Wenang (sekarang Manado) dimekarkan dan kepemimpinan diubah dari Walak menjadi distrik. Saat Logeman, seorang residen Belanda berkuasa tahun 1920, kepala distrik dijabat oleh Hukum Besar (sekarang setingkat bupati), dan distrik Manado dibagi menjadi dua dengan sebutan distrik Kedua (*onderdistrik*) atau distrik Bawahan, yaitu setingkat kecamatan, yang terdiri dari *onderdistrik Zuid* Manado (Manado Selatan) dan *onderdistrik Noord* Manado (Manado Utara). Saat itu kota Manado belum berdiri sendiri, tapi merupakan bagian dari wilayah Minahasa.

Pada tahun 1924 kedua subdistrik (*onderdistrik Zuid* Manado dan *Noord Manado*) disatukan kembali menjadi distrik Manado. Dalam perkembangan selanjutnya, distrik Manado diubah menjadi kota administratif dan kepemimpinan diambil alih oleh bangsa Jepang sampai dengan Indonesia merdeka 17 Agustus 1945. Setelah subdistrik,

wilayah kota Manado dimekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan, kemudian sampai tahun 1989 kota Manado memiliki 5 (lima) kecamatan, yaitu: kecamatan Malalayang, Wenang, Singkil, Mapanget, dan kecamatan Molas; lima wilayah kecamatan ini terdiri dari 68 desa/kelurahan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado nomor 4 Tahun 27 September 2000 tentang Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan di Kota Manado dan PERDA Nomor 5 tanggal 27 Tahun 2000 tentang Pemekaran Kecamatan dan Kelurahan, wilayah kota Manado yang semula terdiri atas 5 kecamatan dengan 68 kelurahan/desa dimekarkan menjadi 9 kecamatan dengan 87 kelurahan dan sekarang 11 kecamatan dengan 89 kelurahan. Dalam perkembangan selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 5 Tahun 2000, jumlah kecamatan yang sebelumnya 5 (lima) dimekarkan menjadi 9 (sembilan) kecamatan. Selanjutnya berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2012, jumlah kecamatan dari 9 dimekarkan menjadi 11 yang kemudian dimekarkan Menjadi kecamatan Molas berdasarkan PP No. 22 Tahun 1988. dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kota Manado No.5 Tahun 2000, Kec. Molas

dimekarkan menjadi tiga yaitu, Kecamatan Singkil, Kec. Tuminting, dan Kec. Bunaken. Untuk Kec. Bunaken sendiri yang merupakan Kecamatan yang akan menjadi tempat penelitian sekarang telah menjadi 5 kelurahan yaitu kelurahan bailing, kelurahan molas, kelurahan meras, kelurahan tongkaina dan di tambah satu kelurahan yang merupakan hasil pemekaran yaitu kelurahan Pandu, yang pada awalnya merupakan bagian dari Kecamatan Wenang. Pengaruh Pemekaran tersebut dirasakan baik karena adanya perubahan secara signifikan pada keadaan beberapa kelurahan yang memiliki masalah transportasi, Namun berdasarkan Prasurvei menunjukan masih terdapat 491 KK (30%) Penduduk Kecamatan Bunaken yang masih tergolong keluarga Prasejahtra, dan 740 KK (45%) tergolong prasejahtra I. Tingkat kesejahteraan Masyarakat yang masih rendah juga terlihat aspek tingkat Pendidikan dan taraf kesehatan masyarakat yang masih rendah, dari hasil prasurvei di lihat dari aspek Pendidikan, yaitu: anak usia 7-12 tahun yang tidak sekolah SD ada 9 orang, SMP 27 Orang, SMA 20 Orang, Pengangguran 14 orang, pada aspek kesehatan, Masyarakat yang tinggal di bantaran Sungai 40 KK, Penduduk yang

tinggal di tempat Rawan air bersih 540 Orang, Penduduk yang tinggal di tempat padat penduduk dan kumuh 117 orang.

METODE PENELITIAN

A. Jenis penelitian

Sesuai tujuan dari penelitian untuk mengetahui pengaruh kebijakan Pemekaran wilayah kecamatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bunaken , maka penelitian ini menggunakan Metode Kuantitatif. Penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.(Sugiyono, 2013)

B. Populasi & Sampel

Penelitian ini akan dilaksanakan di Kec. Bunaken, Manado, populasi penelitian ini ialah warga Masyarakat Kecamatan Bunaken yang seluruhnya berjumlah 20900 Jiwa, maka mengambil sampel secara random di 5 Kelurahan yang ada di Kecamatan Bunaken yaitu : Desa Bailang, Molas, Meras, Tongkaina,

dan Pandu. Besar sampel responden sebanyak 100 orang.

C. Instrumen dan teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kuantitatif, kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen dan kualitas pengumpulan data berkenaan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini instrumen yang digunakan ialah berupa kuesioner dan wawancara.

D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dapat didefinisikan sebagai atribut seseorang, atau objek, yang mempunyai “variasi” antara satu orang dengan yang lain atau satu objek dengan objek yang lain (Hatch dan Farhadi, dalam Sugiyono, 2013). Dalam penelitian ini menggunakan dua variabel beserta dengan definisi operasionalnya :

1. Kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan sebagai variable Independen dengan simbol X dengan definisi operasionalnya ialah pemisahan suatu wilayah administrasi lama ke daerah administrasi baru untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya

kesejahteraan masyarakat (Rustiadi, 2009).

2. Tingkat kesejahteraan Masyarakat Kecamatan Bunaken sebagai Variabel Dependen (dipengaruhi) dengan simbol Y, definisi operasionalnya ialah Tingkat hidup masyarakat ditandai dengan terentaskannya dari kemiskinan, tingkat kesehatan yang lebih baik, perolehan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, dan tingkat produktivitas masyarakat. (Todaro 2003).

E. Teknik Analisis Data

Berdasarkan karakteristik data dan keperluan pengujian hipotesis penelitian, maka teknik analisa data yang sesuai untuk digunakan terdiri dari :

1. Untuk mengidentifikasi masing-masing variabel digunakan analisis presentase yang di deskripsikan dalam tabel distribusi frekuensi.
2. Untuk menguji keeratan hubungan (derajat korelasi) digunakan teknik analisis korelasi product moment, dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:
 - a. Menghitung nilai koefisien korelasi dengan mengoperasikan rumus r -person

- b. Melakukan ujian signifikansi (uji hipotesis) dengan cara mengkonsultasikan nilai r_{hitung} dengan nilai r_{tabel} pada taraf uji 1 % dengan derajat kebebasan $(dk) = n$.
3. Apabila hasil uji ternyata signifikan, menurut Sugiyono (2009) perlu dilanjutkan dengan analisis regresi linier sederhana guna mengetahui bentuk pola hubungan fungsional antara kedua variabel, dengan menyelesaikan persamaan regresi linier sederhana $Y = a + bX$. Untuk mengetahui besarnya kontribusi atau pengaruh efektivitas kepemimpinan kelurahan (X) terhadap partisipasi masyarakat dalam menunjang pembangunan (Y) digunakan analisis determinasi dengan cara mengkwadratkan nilai koefisien korelasi yaitu $(r)^2$.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Variabel Penelitian

Adapun definisi konsep dan definisi operasional dari variable-variabel penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1. Kebijakan pemekaran wilayah kecamatan**
Kebijakan pemekaran wilayah kecamatan sebagai Variabel bebas (X),

yang di maksudkan disini ialah Peningkatan penyelenggaraan Pemerintah yaitu seluruh kegiatan/aktivitas aparatur pemerintahan dalam menjalankan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat di tingkat kecamatan. Penyelenggaraan pemerintahan agar berdaya guna dikecamatan melalui pendekatan birokrasi pemerintahan kepada Masyarakat. Serta meningkatkan keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan. Serta meningkatkan keikut sertaan masyarakat dalam pembangunan.

Indikator-indikator Variabel ini dapat diukur sebagai berikut :

1. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat, untuk mencapai birokrasi yang lebih baik lagi.
2. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah, yaitu berupa Percepatan pengelolaan potensi yang ada di wilayah tersebut.
3. Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik. Untuk mengimplementasikan setiap program-program yang telah ada dalam agenda pemerintah.

Berdasarkan indikator-indikator variabel Pengaruh kebijakan pemekaran wilayah kecamatan (X), selanjutnya dijabarkan kedalam daftar pertanyaan (kuesioner) sebanyak 12 butir pertanyaan dan

didistribusikan kepada 100 responden masyarakat di Kecamatan Bunaken Kota Manado, di 5 kelurahan yang ada, yaitu Kelurahan Bailang, Kelurahan Molas, Kelurahan Meras, Kelurahan Tongkaina, dan Kelurahan Pandu. Setiap pertanyaan disediakan 5 alternatif pilihan (opsi) jawaban untuk dipilih responden, dengan diberi nilai skor : 5 untuk opsi (a), 4 untuk opsi (b), 3 untuk opsi (c), 2 untuk opsi (d), dan 1 untuk opsi (e). maka dilakukan penelitian terhadap 90 responden sehingga di dapati bahwa responden masyarakat kecamatan Bunaken tentang Pengaruh kebijakan pemekaran wilayah kecamatan (X) rata-rata masih berada pada kategori “sedang” atau moderat, yakni sebesar 44% dari 100 responden yang ada, sementara yang terkategori rendah penilaiannya sebanyak sebesar 21%, dan yang terkategori “Tinggi” 35%. Hasil ini menunjukkan bahwa Pengaruh kebijakan pemekaran wilayah kecamatan, di Kecamatan Bunaken Kota Manado, belum memberikan kontribusi secara optimal.

1. Tingkat kesejahteraan Masyarakat

Tingkat kesejahteraan masyarakat dalam hal ini yaitu merupakan suatu perubahan

yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat agar lebih baik dari yang sebelumnya. Dalam hal ini dapat di ukur dari beberapa indicator-indikator variabel sebagai berikut:

- (1) Peningkatan Pendapatan / Income masyarakat, seperti pengolahan wilayah, untuk kepentingan kemajuan perekonomian masyarakat
- (2) Peningkatan Pemenuhan kebutuhan dasar seperti konsumsi, pendidikan, kesehatan, dan gizi masyarakat/keluarga.
- (3) Peningkatan kemampuan pemenuhan, kebutuhan sekunder keluarga.
- (4) Peningkatan kemampuann kebutuhan social-psikologis masyarakat/keluarga.

Mengacu pada indicator-indikator variabel Peningkatan kesejahteraan masyarakat (Y), maka langkah selanjutnya dijabarkan kedalam daftar pertanyaan sebanyak 12 (dua belas) pertanyaan, kemudian didistribusikan kepada 100 responden masyarakat Kecamatan bunaken di 5 Kelurahan yaitu kelurahan Bilang, Kelurahan Molas, Kelurahan Meras, Kelurahan tongkaina, kelurahan pandu, yang setiap kelurahan diambil 20 responden untuk mengisi daftar pertanyaan

yang telah disediakan, Daftar pertanyaan didesain berdasarkan skala likert dan disiapkan 5 (lima) alternative pilihan (opsi) jawaban untuk dipilih responden berdasarkan fakta, pengetahuan dan pengalaman mereka tentang variabel yang ditanyakan. responden masyarakat di Kecamatan Bunaken tentang tingkat kesejahteraan masyarakat sesudah pemekaran (Y) rata-rata masih berada pada kategori “Sedang” yakni sebesar 64 % dari 100 responden masyarakat, sementara yang terkategori rendah penilaiannya sebanyak sebesar 11 % dan yang terkategori “tinggi” sekitar 25 %. Hasil ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan di Kecamatan Bunaken belum secara optimal dicapai, namun telah memadai.

B. Hasil Analisis Data

1. Korelasi product Moment

Teknik analisis korelasi product moment digunakan untuk menguji kuatnya keterkaitan atau derajat korelasi antara Variabel pengaruh kebijakan pemekaran wilayah kecamatan dengan tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bunaken. Dengan melalui analisis korelasi product moment (pearson correlation) ini dapat diketahui sejauhmana atau seberapa besar pengaruh dari pemekaran wilayah

kecamatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat kecamatan Bunaken kota Manado. Derajat korelasi akan ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (r), sedangkan derajat determinasi/pengaruh ditunjukkan oleh nilai koefisien korelasi (r^2). Berdasarkan hasil perhitungan secara manual dengan menggunakan rumus diperoleh koefisien korelasi (r_{xy}) sebesar 0,83 dengan koefisien determinasi (r_{xy}^2) sebesar = 0,69. Hasil uji signifikan dengan menerapkan uji-t, diperoleh thitung = 14,64, ternyata berada jauh di luar daerah penerimaan hipotesis nol (H_0), dimana ttabel pada taraf uji 0,05% dengan dk = 98 diperoleh sebesar 1,671. Dengan demikian H_0 ditolak dan menerima H_a (hipotesis alternatif) yang menyatakan bahwa “Kebijakan Pemekaran Kecamatan berpengaruh Positif terhadap tingkat Kesejahteraan Masyarakat di Kecamatan Bunaken Kota Manado ” dapat diterima.

Karena uji signifikan hubungan (korelasi) antara Variabel Pengaruh pemekaran Wilayah Kecamatan (X) dan tingkat kesejahteraan Masyarakat (Y) dapat diterima, maka akan dilanjutkan dengan analisis regresi sederhana.

2. Regresi Sederhana

Teknik analisis ini digunakan untuk menguji pola hubungan fungsional antara variabel X terhadap Variabel Y. hasil analisis statistic diperoleh persamaan regresi $\hat{Y} = 35,897 + 0,779 X$. setelah dilakukan uji signifikan model regresi dengan menggunakan perhitungan secara manual diperoleh hasil sebagai berikut :

a. uji model regresi atau uji keragaman, diperoleh $F_{hitung} = 6,901$. Setelah dikonsultasikan dengan harga F_{tabel} pada taraf uji 5% ($\alpha : 0,05$) dengan dk pembilang 1 dan dk penyebut 98, diperoleh harga F_{tabel} sebesar 1,427 Ini berarti bahwa F_{hitung} jauh lebih besar dari F_{tabel} ($6,901 > 1,427$). dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa antara Variabel pengaruh pemekaran wilayah kecamatan (X) dengan Variabel tingkat kesejahteraan masyarakat (Y) mempunyai pola hubungan fungsional yang bersifat positif.

a. Uji signifikasi koefisien regresi, diperoleh t_{hitung} sebesar 14,64, sementara t_{tabel} pada taraf uji 5% ($\alpha : 0,05$) dengan $dk = n - 2$ ($100 - 2 = 98$) diperoleh sebesar 1,671. Ini berarti bahwa variabel X berpengaruh signifikan terhadap variabel Y.

C. Pembahasan

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa Upaya pemekaran wilayah dipandang sebagai sebuah terobosan untuk mempercepat pembangunan melalui peningkatan kualitas dan kemudahan memperoleh pelayanan bagi masyarakat. Pemekaran wilayah juga merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam memperpendek rentang kendali pemerintah sehingga meningkatkan efektifitas penyelenggaraan pemerintah dan pengelolaan pembangunan. Hasil penelitian yang dilakukan terhadap 100 responden di 5 Kelurahan yaitu, Kelurahan Bailang, Kelurahan Molas, Kelurahan Meras, Kelurahan Tongkeina, Kelurahan Pandu. Ternyata menemukan bahwa pemekaran wilayah kecamatan di kecamatan bunaken berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Bunaken Kota Manado. Berdasarkan analisis regresi linear didapat persamaan regresi linier tentang hubungan fungsional / pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu $\hat{Y} = 35,897 + 0,779 X$. koefisien regresi $b = 0,779$ yang bertanda positif tersebut jelas menunjukkan bahwa hubungan pengaruh variabel pengaruh pemekaran

wilayah kecamatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat adalah positif dengan pola perkembangan 1: 0,779; artinya perubahan /peningkatan pada pemekaran sebelum dan sesudah sebesar 1 skala/satuan akan menyebabkan perubahan/ peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 0,779. Pola hubungan fungsional atau pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut adalah sangat berarti atau sangat signifikan, sebagaimana ditunjukkan oleh hasil pengujian keberartian regresi dengan uji-F didapat $F_{hitung} = 6,901$. Hasil analisis korelasi product moment juga menunjukkan adanya korelasi dan daya determinasi/pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal itu ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi (r) sebesar 0,83 dan nilai koefisien determinasi (r^2) sebesar 0,69 atau 69%. Hasil analisis korelasi ini memiliki makna bahwa pengaruh pemekaran wilayah kecamatan terhadap tingkat kesejahteraan sebesar 69% artinya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kecamatan bunaken adalah sebesar 69% sedang sisanya 41% ditentukan oleh variabel lain. Hasil penelitian tersebut

memberikan kesimpulan bahwa pemekaran wilayah kecamatan berpengaruh dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kecamatan Bunaken. Dengan demikian H_0 ditolak dan H_a diterima, maka sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh (Praharsena 2013) Pemekaran suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat karena pemekaran wilayah adalah pembentukan wilayah baru yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas dan intensitas pelayanan kepada masyarakat sehingga masyarakat merasa diuntungkan dalam berbagai aspek sosial. Dalam artinya masyarakat dapat merasakan dampak positif dari pemekaran tersebut sesuai dengan tujuannya.

Hasil perhitungan ketetapan prediksi di atas menunjukkan bahwa apabila kinerja pemerintah dalam mengelola wilayahnya serta memperhatikan kesejahteraan masyarakat dapat ditingkatkan sebesar nilai (score) maksimum variabel tersebut hasil pengamatan (58) dari kondisi yang ada sekarang, maka diharapkan akan terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat sebesar 81,079 skala; atau jika dihitung dalam skala ideal pengukuran variabel ini

(yakni 60), kesejahteraan masyarakat akan meningkat sebesar 82,637%. Hasil perhitungan prediksi ini dapat mengindikasikan bahwa pemekaran wilayah kecamatan berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat, hal ini di perkuat dengan sebuah penelitian yang dilakukan oleh *Julman masamba di Provinsi Papua barat*, berdasarkan hasil penelitian maka di dapati bahwa dengan ada Pemekaran Daerah ternyata membawa dampak bagi masyarakat. Dampak yang terjadi adalah dampak yang diharapkan bersifat langsung dan tidak langsung, dan dampak yang tidak diharapkan yang juga bersifat langsung dan tidak langsung dan Ternyata dengan Pemekaran Daerah Kabupaten ini dapat meningkatkan pelayanan publik dalam arti wilayah yang mengecil memberikan kemudahan bagi masyarakat dengan adanya efisiensi biaya dan waktu. Berdasarkan teori yang di buktikan oleh Juan Masamba serta hasil yang di peroleh oleh peneliti maka, dapat di buktikan bahwa Pemekaran wilayah berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut maka Undang-Undang Nomor: 32 Tahun '2004 bertujuan untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan

prakarsa dan kreativitas masyarakat serta mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi intinya adalah memberikan kewenangan kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakatnya yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Dengan demikian pemikiran yang mendasari lahirnya Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 adalah : Dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.

Penyelenggaraan otonomi daerah dilakukan dengan prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, kemandirian, menjaga keserasian hubungan dengan Pemerintah Pusat serta memperhatikan potensi dan keberagaman daerah.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas dan hasil penelitian yang telah di kemukakan pada bab sebelumnya, maka dapatlah di peroleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dilihat dari indikator yang dipakai menunjukan bahwa kebijakan

- pemekaran wilayah kecamatan Bunaken dan cukup dirasakan oleh sebagian besar masyarakat di 5 kelurahan, yaitu kelurahan Bailang, Molas, Meras, tongkaina, Pandu, namun belum maksimal dilihat dari segi peningkatan pelayanan public, percepatan pembangunan perekonomian, wilayah, percepatan pengelolaan potensi wilayah dan penyelenggaraan pemerintah yang baik.
2. Walaupun melihat kinerja pemerintah dalam pemekaran di kecamatan Bunaken ± 14 tahun dan sudah cukup dirasakan masyarakat namun realitanya taraf hidup sebagian masyarakat masih rendah.
 3. Berdasarkan analisis regresi linier dan korelasi product moment menunjukan bahwa kebijakan pemekaran wilayah Kecamatan Bunaken berpengaruh dan punya korelasi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

D. SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil – hasil dalam penelitian ini maka dapat di kemukakan beberapa saran kepada pihak –

pihak terkait (implementor) daripada kebijakan pemekaran wilayah kecamatan, yaitu sebagai berikut:

1. Responsive dari pada pemerintah setempat sangat di butuhkan dalam penyelenggaraan kinerja pemerintah terhadap kebijakan pemekaran yang menjadikan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
2. Dengan adanya perhatian khusus daripada pemerintah kecamatan bunaken terhadap masyarakat maka pemerintah setempat lebih meningkatkan kordinasi dengan , dinas kesehatan, dinas pendidikan, dan instansi terkait lainnya. Serta adanya kerjasama, konsisten, dan komitmen dari aparatur-aparatur pemerintah setempat, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab dalam mengembangkan wilayahnya dan mensejahterakan masyarakat di Kecamatan Bunaken.

DAFTAR PUSTAKA

Rustiadi Erna, Saefulhakim, dan Dyah R panuju (2009). *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. DKI

- Jakarta : Crestpent Press dan Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Juan (2010). *Dampak pemekaran wilayah terhadap efektifitas pelayanan public provinsi papua barat*. Skripsi
- Prasena,2013. *Pemekaran Daerah*, Jogjakarta
- Sugiono,(2013). *Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif, Dan R&D*.Bandung : Alfabeta
- Sugiono, (2007). *Statistika untuk penelitian* . Bandung ; Alfabeta
- Todaro,Michael P (2003). *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Alih Bahasa: Aminuddin dan Drs.Mursid. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sumber lain :
- UU Nomor 32 Tahun 2004.